

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya pembangunan memiliki tujuan utama yaitu mengubah kehidupan yang lebih baik dan lebih berguna bagi kehidupan manusia, dalam pembangunan banyak aspek yang melibatkan sumber daya yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dimana kegiatan ini dilaksanakan secara berkelanjutan yang berlandaskan pengetahuan dan teknologi yang tentunya tak mengesampingkan permasalahan yang pasti ada pada setiap pembangunan, dalam hal ini memperhatikan sumberdaya alam yang ada serta lingkungan hidup yang mana menjadi sarana utama dalam mencapai keberhasilan dari pembangunan dengan harapan memberikan jaminan kesejahteraan dimasa yang akan datang.

Suratmo, F. Gunawan. (2009) memaparkan dalam bukunya bahwa pembangunan pada suatu rancangannya memang ditujukan untuk meningkatkan sosial ekonomi masyarakat, dan dapat disimpulkan secara teoritis dampak dari setiap perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan maupun belum haruslah memberikan dampak yang positif bagi masyarakat setempat, provinsi, nasional maupun internasional. Pembangunan sangat erat kaitanya dengan penggunaan lahan, penggunaan lahan sendiri merupakan dampak dari sikap, kebijakan, dan aktivitas manusia pada lingkungan, menjadi sesuatu yang harus di perhatikan bahwa peralihan penggunaan lahan pertanian yang dialihkan ke non pertanian seperti industri selalu memberikan dampak, apabila hal ini dikesampingkan maka

lambat laun lahan pertanian produktif akan berkurang dan memberikan efek jangka pendek menurunnya produksi pertanian serta efek jangka panjang berkurangnya cadangan akan padi yang mengakibatkan kelangkaan dan menyebabkan naiknya harga.

Todaro, M., Smith, I. I., Stephen, C. (2012), dalam bukunya menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi dilihat dari perubahan yang terencana pada struktur produksi serta kesempatan kerja, didalam proses inilah peranan dari sektor pertanian akan menurun yang disebabkan dibukanya peluang untuk memanfaatkan sektor manufaktur serta jasa. Selama ini konsep pembangunan selalu berfokus pada proses industrialisasi yang pesat yang merugikan pertanian serta pedesaan, oleh karna itulah pembangunan harus memiliki sifat multidimensi yang melibatkan bermacam perubahan pada struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga nasional, percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan. Pembangunan hendaknya menjadi upaya merubah kondisi kehidupan yang dipandang tidak memuaskan menjadi lebih baik secara lahir dan batin.

Pembangunan pada masyarakat setidaknya harus memiliki tiga tujuan yang *pertama*; ialah peningkatan ketersediaan pangan, tempat tinggal, kesehatan, dan perlindungan yang, *kedua*; ialah peningkatan standar hidup, bukan hanya peningkatan pendapatan saja namun juga tersedianya lapangan pekerjaan yang lebih banyak, pendidikan yang lebih baik dan yang, *ketiga*; perhatian besar terhadap nilai nilai budaya dan kemanusiaan.

Nasoetion, L., J. Winoto. (1996). Adanya perkembangan pembangunan akan memberikan dampak pada alih fungsi lahan, alif fungsi lahan sendiri di artikan

sebagai perubahan fungsi pada suatu lahan dalam jangka waktu yang berbeda, faktor yang mempengaruhi perubahannya ialah faktor politik dan faktor ekonomi. Faktor politik mempengaruhi pola perubahan lahan karna adanya kebijakan yang di ambil oleh pengambil keputusan, sedangkan faktor ekonomi dikarnakan perubahan pendapatan serta pola konsumsi yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan ruang semain meningkat sehingga terjadilah alih fungsi lahan.

Sutanto. (1986), adanya alih fungsi lahan tentunya akan merubah penggunaan akan lahan, penggunaan akan lahan adalah segala jenis kegiatan pemanfaatan lahan oleh manusia baik itu menjadi lahan persawahan atau pemukiman hingga rumah makan, rumah sakit, kuburan, tergantung pada aktivitas dan tujuan dari masyarakat itu sendiri. Pemanfaatan dari penggunaan lahan muncul dari perubahan antara jumlah penduduk atau adanya faktor politik dan ekonomi yang mempengaruhi, pada daerah pinggiran kota atau pedesaan penggunaan lahan biasanya di gunakan untuk pertanian karna sifat hidupnya yang homogen agraris sedangkan pada wilayah kota di gunakan sebagai industri, perumahan, perkantoran hal ini di karnakan sifat hidup heterogen matrealistis. Seiring dengan peningkatan aktivitas pada lahan, maka penggunaan dari lahan juga akan mengalami perubahan sesuai dengan motivasi dan apa yang di butuhkan oleh manusia yang menempatnya, perubahan yang dinamis ini terjadi seiring dengan penambahan aktivitas penduduk.

Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini sedang gencar melakukan pembangunan baik itu pembangunan sarana sosial ataupun pembangunan properti, pembangunan selama ini hanya terpusat di kota Yogyakarta dan kabupaten Sleman

saja, saat ini pemerintah tak hanya mengencarkan pembangunan di kedua kabupaten itu saja. Seolah ingin mematahkan stereotip pembangunan yang hanya terpusat di kota Yogyakarta dan kabupaten Sleman, pemerintah kini mulai meratakan pembangunan industri dan sarana sosial, saat ini pemerintah gencar melakukan pembangunan sarana sosial, industri, ataupun investasi di kabupaten lain seperti Bantul, Gunung Kidul maupun Kulon Progo, hal ini bertujuan meningkatkan pembangunan dan PAD (Pendapatan Asli Daerah) di tiap-tiap kabupaten sendiri.

Bandara Internasional Yogyakarta di kabupaten Kulon Progo mulai terdengar gaung isunya pada masa pemerintahan dari bupati sebelumnya yakni Pak Hasto, isu pembangunan dimulai di penghujung 2011 dan menimbulkan berbagai pertentangan di masyarakat, setidaknya tujuh tahun belakangan ini masyarakat Kulon Progo khususnya petani mengalami pergolakan dari adanya pembangunan bandara yang mengorbankan lahan pertanian dan pemukiman masyarakat, sampai saat ini ada lima desa yang terdampak oleh pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di kabupaten Kulon Progo di kecamatan Temon yaitu desa Palihan, Glagah, Sindutan, Kebonrejo, dan desa Jangkar, dan dilihat dari kelima desa tersebut desa Palihan dan Glagah yang terkena dampak paling besar.

Pada Triyono. (2012), dijelaskan bahwa status Bandara Adisucipto ialah bandara militer yang disewa oleh pihak PT. Angkasa Pura untuk kepentingan penerbangan komersial, hal ini jarang diketahui oleh masyarakat, memang sudah seharusnya Yogyakarta memiliki lokasi lain untuk digunakan sebagai bandara dengan kondisi dan fasilitas yang lebih baik. Menurut hasil *feasibility study* yang

dilakukan pada tujuh lokasi, Kulon Progo merupakan lokasi yang paling tepat dan ideal. Rencananya, bandara yang akan dibangun di Kulon Progo ini merupakan bandara yang memiliki standar internasional dengan konsep sebagai bandara terpadu yang dilengkapi dengan fasilitas kesehatan di dalamnya, pembangunan bandara ini merupakan kerjasama antara PT. Angkasa Pura, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi DIY, dan pemerintah kabupaten Kulon Progo serta investor asal Swiss.

Dalam Wahyukinasih, E. (2016), di jelaskan bahwa Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di kabupaten Kulon Progo pada kecamatan Temon berasal dari hasil pengkajian dan pemilihan tempat, yang mana pilihannya jatuh pada kabupaten Kulon Progo. Dijelaskan bahwa rencana megaproyek pembangunan bandara internasional Kulon Progo dimulai tahun pada 2007 melalui Pra *Feasibility Study* yang dibuat *Mott Mac Donald*, dari hasil studi di peroleh hasil bahwa Kecamatan Temon, Kulon Progo merupakan lokasi alternatif yang mendapatkan penilaian tertinggi jika dibandingkan dengan lokasi lainnya, hal lainnya dikarenakan kabupaten Kulon Progo memiliki Pendapatan Asli Daerah yang tidak banyak, menurut data Badan Pusat Statistik (2010), oleh karna itu Pemerintah Kulon Progo yang mengusung semangat Kulon Progo *The Jewel Of Java* ini, mendukung adanya rencana pembangunan bandara tersebut.

Pada Sri Bintang Pamungkas, Anggalih Bayu (2017,27 Desember), PT. Angkasa Pura I, memberikan alasan mengapa perlu adanya pembangunan bandara internasional Yogyakarta yaitu:

1. Pertama, kapasitas terminal Bandara Adisucipto sudah tak mampu menyediakan *take off* dan *landing*, serta daya tampung Bandara Adisucipto saat ini hanyalah 1,2-1,5 juta, sedangkan jumlah sampai tahun 2014 telah mencapai 6,2 juta penumpang, serta kapasitas area parkir pesawat (apron) yang tidak mencukupi hanya bisa menampung 8 apron.
2. Kedua, transportasi udara yang baru di Yogyakarta diperlukan melihat Yogyakarta sebagai lokasi destinasi wisatawan lokal maupun mancanegara, dimana wisatawan tersebut memerlukan jasa transportasi yang efektif, nyaman, dan efisien, ditambah lagi perlunya pembangunan bandara baru untuk memenuhi jasa penerbangan domestik maupun non-domestik yang meningkat tiap tahunnya dikarenakan kebutuhan konsumen.
3. Ketiga, Bandara Adisucipto adalah milik Pangkalan TNI AU yang sebenarnya tidak dikomersilkan, sewaktu waktu ketika TNI AU melaksanakan latihan pesawat akan mengakibatkan terganggunya penerbangan dan menyebabkan keterlambatan.

Setiap proses pembangunan pasti selalu dihadapkan dengan pro dan kontra, termasuk pembangunan bandara ini. Pembangunan bandara baru ini mendapatkan penolakan dari masyarakat sekitar khususnya petani, hal tersebut menciptakan hambatan sosial yang mana menjadi hambatan utama, penolakan pembangunan bandara dilakukan oleh kelompok masyarakat kontra yang kehilangan lahannya akibat keberadaan bandara yakni kelompok Wahana Tri Tunggal (WTT), sedangkan masyarakat yang mendukung adanya bandara tetap mengajukan syarat

yang diajukan dan harus dipenuhi meliputi ganti rugi lahan, masalah ketenagakerjaan, kompensasi pakualam ground, serta relokasi gratis.

Pada Wahyukinasih, E. (2016). Masyarakat yang setuju dan netral mengatakan pembangunan bandara harus diwujudkan karena merupakan program pemerintah, sedangkan masyarakat yang tidak setuju memiliki pandangan kebijakan pembangunan bandara harus dibatalkan karena dirasa tidak adil untuk petani, masyarakat yang setuju menyatakan pembangunan bandara dapat memberikan dampak yang positif, sedangkan masyarakat yang tidak setuju memiliki alasan bahwa pembangunan bandara akan memberikan dampak yang negatif, pada masyarakat netral setuju dengan pembangunan bandara karna terpaksa, masyarakat yang setuju akan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Tim, sedangkan masyarakat yang tidak setuju melakukan penolakan dan tidak bersedia mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Tim, dan masyarakat netral lebih memilih untuk diam. Perbedaan pandangan dari masyarakat sendiri menciptakan ketegangan antara masyarakat hal ini tentunya mempengaruhi interaksi sosial dan konflik pemanfaatan lahan pada sesama masyarakat.

Lokasi pembangunan yang menggunakan lahan pertanian membuat masyarakat menolak pembangunan dikarenakan lokasi pembangunan ialah lahan pertanian yang menjadi penopang hidup dan kesejahteraan petani, yang mana alih fungsi lahan membuat hilangnya mata pencaharian, hilangnya lahan pertanian yang mereka kelola tentu menyebabkan hilangnya mata pencaharian petani, hal ini menciptakan dampak sosial yang terjadi dari pembangunan bandara yaitu munculnya konflik antar masyarakat dan pihak pembangun bahkan antara sesama

masyarakat, tetangga, bahkan keluarga. Para petani pesimis akan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dikarenakan kebanyakan petani hanya berpendidikan SD dan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan posisi yang strategis, jaminan lapangan pekerjaan yang di berikan PT. Angkasa Pura hanya diperuntukan untuk mereka yang memenuhi kualifikasi, selain itu sebagian warga yang telah memasuki usia tidak produktif tentu tidak akan mendapatkan pekerjaan di bandara.

Pada Puryantoro, Sulistyarningsih (2012), penjualan lahan pertanian memberikan efek pengurangan tingkat pendapatan, hal tersebut dikarenakan hilangnya mata pencaharian serta uang hasil penjualan tidak dijadikan sebagai modal usaha namun digunakan untuk biaya hidup sehari hari, sebab lainnya ialah kebanyakan petani tidak memiliki kemampuan lain selain tani serta tidak adanya tindak lanjut dari pemerintah dalam memberikan pelatihan kewirausahaan yang nantinya menjadi modal bagi petani melanjutkan usahanya, hal tersebut bisa saja terjadi pada petani Kulon Progo dimana apabila ganti untung yang di berikan tim pembangun tidak dijadikan modal usaha maka akan memberikan dampak yang buruk bagi petani, telah menjadi tugas bagi pemerintah setempat untuk memberikan pelatihan kepada warga terdampak agar warga memperoleh skil untuk melakukan pekerjaan lain yang kiranya pelatihan yang diberikan berkaitan dengan pembangunan bandara, agar adanya bandara menciptakan lapangan pekerjaan bagi petani bukan menghilangkan pekerjaan.

Ramadhan, A. C., Rahdriawan, M. (2011). Adanya alih fungsi lahan pertanian ini membuat petani kehilangan pekerjaan sebagai petani dan harus mencari pekerjaan lainnya untuk tetap bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-

hari, pada kawasan pedesaan yang adatnya masih kuat membuat petani beranggapan bahwa jika mata pencaharian mereka sebagai petani sudah tidak bisa diteruskan lagi maka akan sulit mencari pekerjaan kembali, mereka hanya mempunyai keahlian sebagai petani yang identik dengan karakteristik masyarakat pedesaan. Salah satu cara yang bisa dilakukan petani untuk tetap bisa mencukupi kebutuhan hidupnya adalah dengan cara berdagang hasil pertanian mereka di Pasar.

Pada Sri Bintang Pamungkas, Anggalih Bayu (2017,27 Desember). Pembangunan bandara internasional pengganti Bandara Adisutjipto ini akan menghabiskan lahan seluas 637 hektar, yaitu 6 sampai 7 kali luas Bandara Adisudjipto saat ini, sebanyak 419 kepala keluarga terkena dampak pembangunan ini, terlebih lagi masyarakat di daerah tersebut memiliki mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani sehingga yang paling terpengaruhi adalah petani yang kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian serta pendapatan mereka sebagai petani.

Pembangunan bandara dilahan seluas 637 hektar ini tidak terlepas dari perlawanan dan gugatan dari warga terdampak pembangunan bandara yang merasa dirugikan. Pemenangan gugatan di PTUN oleh masyarakat di kasasi oleh pemerintah dan memenangkan gugatan membuat pemerintah terus berusaha melanjutkan pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta, pemerintah sendiri menyiapkan tiga skema ganti untung yakni pembayaran tunai, relokasi dan pemberian tanah pengganti pada warga terdampak. Adanya pergolakan dan konflik yang terjadi sampai sekarang di karenakan perubahan dari alih fungsi lahan di pinggiran kota sendiri yang belum memberikan efek yang positif, karna pada

dasarnya perubahan memiliki dua efek yang pasti terjadi yakni kemunduran atau kemajuan, disintegrasi atau integrasi, alih fungsi penggunaan lahan ini selalu akan memberikan dampak sosial ekonomi bagi kehidupan masyarakat secara langsung atau tidak langsung.

Kecamatan Temon merupakan salah satu kecamatan di Kulon Progo yang merupakan wilayah yang memiliki lahan produktif pertanian adanya pembangunan, bandara internasional yang baru dipastikan akan menyebabkan alih fungsi lahan yang banyak menggunakan lahan masyarakat dan diperkirakan akan menyebabkan alih fungsi lahan di sekitarnya menjadi bangunan fisik hingga ratusan hektar tiap tahunnya, hal tersebut akan menimbulkan pergeseran dari nilai lahan baik secara sosial maupun ekonomi. Dampak negatif yang paling dirasakan oleh masyarakat sekitar adalah hilangnya lahan sawah yang menjadi sumber utama dari mata pencaharian masyarakat sekitar yang mana memberikan manfaat luas secara ekonomi dan lingkungan.

Hal ini lah yang membuat peneliti memilih desa Glagah di kecamatan Temon pada padukuhan Bapangan dan Kepek sebagai lokasi penelitian, pemilihan dua pedukuhan ini dikarenakan pedukuhan Bapangan dan Kepek merupakan salah satu pedukuhan yang telah melakukan relokasi dan berpindah tempat tinggal pada lokasi baru, hal lainnya dikarenakan desa Glagah pada Kulon Progo dalam angka (2017), memiliki luas lahan sawah sebesar 125 ha, 144 ha lahan kering dan 153 ha lahan perumahan menjadikan desa Glagah sebagai desa terluas di kecamatan temon dengan luas keseluruhan lahan 603,94 ha serta jumlah masyarakat desa Glagah sebesar 2.820 jiwa menjadikan desa Glagah desa dengan penduduk terbanyak di

kecamatan temon, dengan luas panen padi sebesar 230 ha dan 1.463,70 ton menjadikan desa ini menjadi salah satu penyumbang ketahanan pangan Kulon Progo dan hal ini tentunya akan sulit dicapai apabila pembangunan bandara membuat lahan pertanian berkurang dan hilangnya lahan usaha pertanian milik petani dan buruh tani, di desa Glagah sendiri kegiatan pertanian menjadi kegiatan ekonomi pokok dimana hampir semua rumah tangga yang berada di desa Glagah bekerja pada sektor pertanian, yakni sebanyak 493 dari 781 rumah tangga.

Rencana pembangunan bandara menghasilkan tanggapan yang beragam dari masyarakat, hal ini berakibat munculnya kelompok pro maupun kontra pada rencana pembangunan bandara, hal ini semakin memperburuk interaksi sosial antara masyarakat belum lagi dampak pada mata pencaharian petani dan pendapatan dikarenakan hilangnya lahan untuk bekerja, oleh karena itu dampak pembangunan bandara terhadap sosial ekonomi petani di desa Glagah menjadi hal yang menarik untuk di kaji, adanya sikap pro dan kontra menimbulkan konflik sosial di masyarakat desa Glagah karena memiliki kepentingan yang berlainan.

Alasan inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perubahan sosial ekonomi pada petani terdampak. Dengan permasalahan yang ada maka peneliti membuat judul penelitian dengan judul “DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN TERHADAP SOSIAL EKONOMI PETANI”.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini ditujukan pada petani pemilik lahan dan buruh tani yang menjadikan pekerjaan tani sebagai pekerjaan pokok maupun sampingan, yang mana befokus pada petani yang terdampak pembangunan bandara dan telah terelokasi rumahnya dalam hal ini peneliti mengambil padukuhan Bapangan dan Kepek di desa Glagah.

C. Rumusan Masalah

Dengan melihat uraian yang telah dipaparkan dari latar belakang tersebut maka disimpulkan secara singkat bahwa keberadaan pembangunan bandara internasional Yogyakarta di Kulon Progo memberi dampak terhadap alih fungsi lahan pada perubahan aspek sosial ekonomi petani di desa Glagah pada padukuhan Kepek dan Bapangan, hal ini menjadi dasar dan faktor utama dan menciptakan pertanyaan “seberapa jauh dampak alih fungsi lahan di Kulon Progo terhadap sosial ekonomi petani”.

D. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari penelitian ialah untuk melihat sebesar dampak dari alih fungsi lahan terhadap aspek sosial ekonomi petani. Agar peneliti mencapai tujuan maka peneliti memiliki sasaran penelitian diantaranya adalah:

1. Mengetahui dampak dari alih fungsi lahan terhadap sosial ekonomi petani yang terdampak pembangunan bandara

2. Melihat pengaruh variabel yang nantinya akan menjadi tolak ukur dan indikator untuk menentukan dampak alih fungsi lahan, variabel tersebut antara lain antara lain perubahan:
 - a. Perubahan pola kepemilikan lahan
 - b. Perubahan tingkat kesejahteraan
 - c. Interaksi sosial
 - d. Konflik pemanfaatan lahan
 - e. Perubahan mata pencaharian
 - f. Perubahan pendapatan

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, diharapkan peneliti dapat menjadi sarana dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan bidang ekonomi pembangunan yang dipelajari selama menjalani perkuliahan di Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.
2. Bagi pemerintah daerah maupun pusat, informasi ini dapat menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan pembangunan infrastruktur yang sejalan dengan pembangunan di kabupaten Kulon Progo.
3. Bagi civitas akademi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang digunakan untuk penelitian selanjutnya.